



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Terhadap Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah

Ronni Haga^{1*}, Sanjayanto Nugroho², John Budiman Bancin³, Andreas F. Christmas⁴

^{1,2,3} Program Studi Manajemen, ⁴ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Alamat: Jalan Yos Sudarso Palangka Raya Indonesia

Korespodensi email: Ronnihaga@upr.ac.id

Abstract. *This study examines the influence of Local Own Revenue and Balance Funds on government expenditure and economic growth in Central Kalimantan. Economic development is a primary goal of local governments aimed at enhancing community welfare, requiring sufficient funding sourced from PAD and Balance Funds provided by the central government. Central Kalimantan, rich in natural resources, faces challenges in optimizing the utilization of these funding sources to support effective local government spending that promotes sustainable economic growth. The research employs a quantitative approach with panel data from 14 districts/municipalities over the 2010–2022 period. The findings indicate that both Local Own Revenue and Balance Funds and Balance Funds significantly affect government spending and, consequently, economic growth, highlighting the need for strategic financial management in regional governance to achieve better economic outcomes for the community.*

Keyword : Revenue, Region, Balance, Economy

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang memerlukan sumber pendanaan yang cukup dari (PAD) dan Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat. Kalimantan Tengah, yang kaya akan sumber daya alam, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan ini untuk mendukung pengeluaran pemerintah daerah yang efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 14 kabupaten/kota selama periode 2017–2022. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik (PAD) maupun Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi, sehingga menekankan perlunya manajemen keuangan strategis dalam pemerintahan daerah untuk mencapai hasil ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pendapatan, Daerah, Perimbangan, Ekonomi

1. PENDAHULUAN

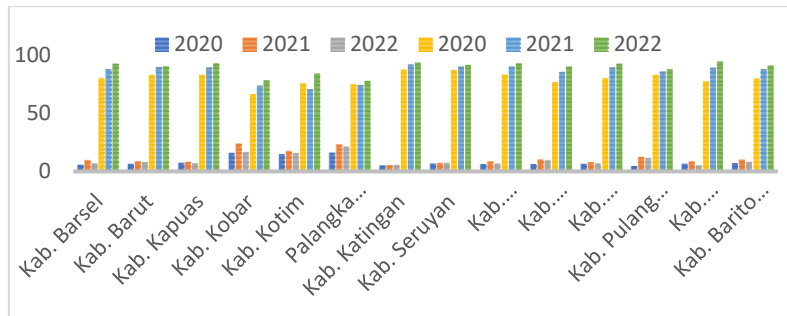
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang cukup, salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonominya untuk membiayai kebutuhan pembangunan, sementara Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung pemerataan pembangunan.

Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan

Received November 01, 2024; Received November 20, 2024; Accepted December 05, 2024;

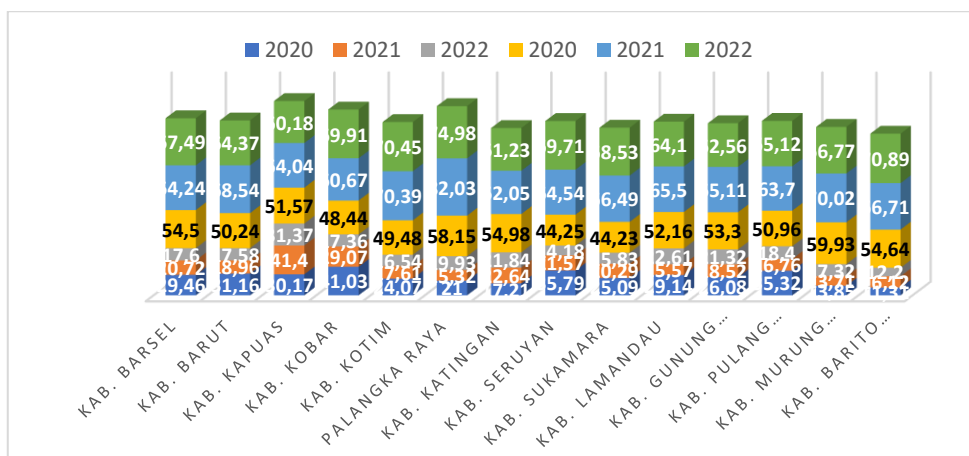
Published December 06, 2024

PAD dan Dana Perimbangan untuk mendukung belanja pemerintah daerah yang efektif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah, ketergantungan pada Dana Perimbangan, serta alokasi belanja yang belum sepenuhnya produktif menjadi isu penting yang memerlukan kajian mendalam.



Gambar 1. Rasio PAD dan Dana Perimbangan Terhadap total Pendapatan Daerah
Sumber Kementerian Keuangan (2024)

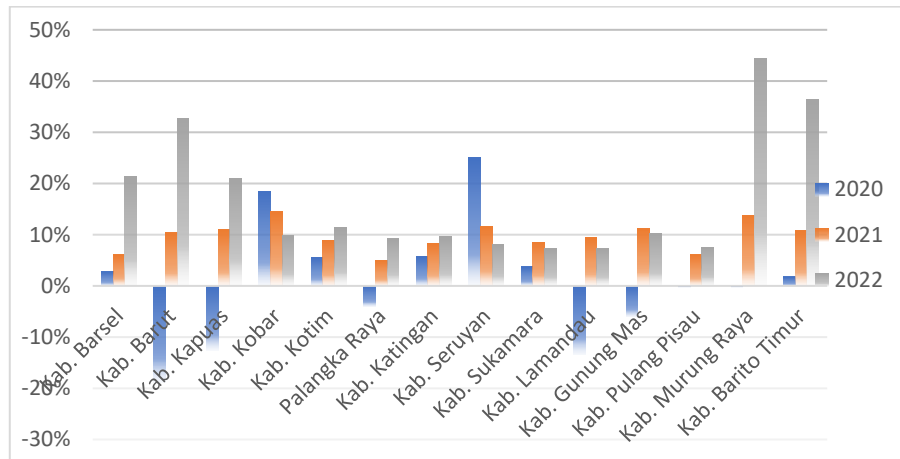
Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih rendah di sebagian besar wilayah, karena PAD umumnya jauh lebih kecil dibandingkan Dana Perimbangan. Sebagai contoh, Kabupaten Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki PAD sebesar 16,5% pada tahun 2022, namun masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan yang mencapai 78,39%. Hal serupa juga terlihat di Kabupaten Katingan, dengan PAD hanya 5,7% di tahun 2022 dibandingkan Dana Perimbangan sebesar 93,85%. Tren ini menunjukkan bahwa mayoritas daerah masih bergantung pada dana pusat, yang mengindikasikan perlunya strategi untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui penguatan potensi ekonomi daerah.



Gambar 2. Rasio Belanja dan Operasional Terhadap total Belanja Daerah
Sumber Kementerian Keuangan (2024)

Gambar 2 menunjukkan terjadi penurunan signifikan pada Belanja Modal di sebagian besar wilayah, seperti Kabupaten Kota Waringin Barat yang turun dari 41,03% pada tahun

2020 menjadi 17,36% pada tahun 2022. Penurunan serupa juga terjadi di Kabupaten Barito Timur dari 11,31% pada tahun 2020 menjadi 12,2% pada tahun 2022. Sebaliknya, Belanja Operasional cenderung meningkat di banyak wilayah, mencerminkan alokasi yang lebih besar untuk kebutuhan rutin, seperti Kabupaten Kotim yang naik dari 49,48% pada tahun 2020 menjadi 70,45% pada tahun 2022. Tren ini menunjukkan bahwa fokus pengeluaran daerah lebih banyak diarahkan pada operasional dibandingkan investasi modal, yang dapat berdampak pada pembangunan jangka panjang di wilayah-wilayah tersebut.



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah
Sumber Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 3 beberapa kabupaten menunjukkan pemulihan yang signifikan dan pertumbuhan yang mengesankan pada tahun 2021 setelah mengalami tahun yang sulit pada 2019 dan 2020. Misalnya, Kab. Barut mengalami penurunan tajam sebesar -19% pada tahun 2019 namun meningkat menjadi 33% pada tahun 2021. Demikian pula, Kab. Murung Raya yang hanya tumbuh -0.21% pada tahun 2019, melonjak menjadi 44% pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan paling drastis di antara kabupaten lain. Tren ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan potensi pertumbuhan yang kuat di beberapa wilayah pasca Covid 19. Beberapa kabupaten lain, seperti Kab. Seruyan dan Kab. Lamandau, meskipun mengalami pertumbuhan positif di tahun 2020, cenderung menurun pada tahun 2021, menandakan variasi dalam keberhasilan strategi pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan ekonomi yang lebih baik di masa depan.

2. KAJIAN TEORISTIS

Teori Ekonomi Fiskal

Teori Ekonomi Fiskal menjelaskan bagaimana pemerintah memanfaatkan instrumen fiskal, yaitu pendapatan dan pengeluaran, untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan pendapatan (Najmuddin, 2020). Dalam pemerintahan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapasitas daerah untuk menggali potensi ekonominya guna membiayai pembangunan secara mandiri, sementara Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan mendukung pemerataan pembangunan (Pangestu *et al.*, 2022). Pengelolaan fiskal yang efektif sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, terutama melalui perencanaan dan alokasi sumber daya yang tepat. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar yang relevan untuk mengeksplorasi hubungan antara PAD, Dana Perimbangan, dan pengaruhnya terhadap belanja pemerintah daerah serta pertumbuhan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Theory*)

Teori Pertumbuhan Ekonomi memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, termasuk peran investasi, akumulasi modal, dan inovasi. Pendekatan *Endogenous Growth Theory* menekankan bahwa investasi dalam modal fisik, modal manusia, serta pengembangan teknologi merupakan kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Cervellati *et al.*, 2022). Dalam konteks belanja pemerintah daerah, alokasi belanja modal pada sektor strategis, seperti infrastruktur dan pendidikan, dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, teori ini relevan untuk menganalisis dampak investasi publik yang dilakukan melalui belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Arif *et al.*, 2020).

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Pemerintah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam mendukung belanja pemerintah daerah, karena (PAD) mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat (Haga, 2024). (PAD) yang tinggi memungkinkan daerah untuk lebih leluasa dalam menentukan alokasi belanja, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal, yang berdampak langsung pada pembangunan daerah (Ghani, 2017). Namun, daerah dengan (PAD) rendah cenderung menghadapi keterbatasan anggaran sehingga lebih bergantung pada Dana Perimbangan atau sumber pendanaan lain dari pusat. Hal ini sering

kali membatasi inovasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan PAD melalui optimalisasi potensi daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah, menjadi prioritas untuk mendukung kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan (Astuti *et al.*, 2021).

Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Pemerintah

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Dana Perimbangan memungkinkan daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas untuk membiayai kebutuhan dasar pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dana Perimbangan umumnya memberikan alokasi anggaran yang cukup besar dalam APBD, sehingga turut mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal. Namun, penggunaan Dana Perimbangan harus dikelola secara efektif dan terarah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan percepatan pembangunan ekonomi daerah (Sari & Wirama, 2018) (Asari & Suardana, 2018).

Hubungan Belanja Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi menjelaskan bahwa belanja pemerintah, khususnya belanja modal, merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Sari & Wirama, 2018). Belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sarana prasarana publik, dan pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pemerintah daerah yang efektif, baik bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan, dapat mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, beberapa penelitian terdahulu (Sumangkut *et al.*, 2019) (Asari & Suardana, 2018) (Sari & Wirama, 2018) (Andriana, 2020) telah mengkaji hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah yang kuat, mulai dari kemampuan daerah dalam memaksimalkan pajak dan retribusi hingga hasil pengelolaan aset daerah (Savira *et al.*, 2022). Daerah dengan (PAD) yang tinggi sering kali menunjukkan stabilitas fiskal yang baik, daya tarik yang kuat bagi investor, dan potensi ekonomi yang menjanjikan (Lestari *et al.*, 2022). Investor cenderung lebih tertarik

menanamkan modal di daerah yang memiliki keuangan daerah yang solid, karena dianggap mampu menyediakan infrastruktur, fasilitas pendukung, dan iklim bisnis yang kondusif (Novitasari *et al.*, 2020). Selain itu, (PAD) yang tinggi juga mencerminkan kapasitas ekonomi daerah yang berkembang, seperti aktivitas bisnis yang aktif, produktivitas yang tinggi, dan kontribusi sektor-sektor unggulan yang signifikan. Hal ini menciptakan efek kepercayaan, di mana daerah tersebut dianggap memiliki risiko ekonomi yang lebih rendah dan prospek pertumbuhan yang lebih baik.

Hubungan Dana Perimbangan dengan Pertumbuhan Ekonomi

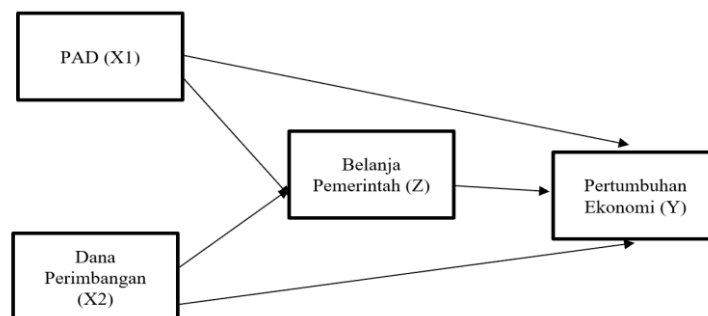
Pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Pangestu *et al.*, 2022). Sebagai transfer dari pemerintah pusat, Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan mendukung pemerataan pembangunan (Rhamedia, 2022). Dengan alokasi yang tepat, Dana Perimbangan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan strategis, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Infrastruktur yang memadai, misalnya, dapat mendorong efisiensi logistik, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas, yang pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan daerah (Kusharsanto *et al.*, 2021). Selain itu, Dana Perimbangan juga memberikan stabilitas anggaran bagi daerah yang belum memiliki kapasitas fiskal yang memadai, sehingga dapat menjaga kelangsungan program-program pembangunan di berbagai sektor.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah

Tingginya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah yang kuat, mulai dari kemampuan daerah dalam memaksimalkan pajak dan retribusi hingga hasil pengelolaan aset daerah. Daerah dengan yang tinggi sering kali menunjukkan stabilitas fiskal yang baik, daya tarik yang kuat bagi investor, dan potensi ekonomi yang menjanjikan (Sari & Wirama, 2018). Investor cenderung lebih tertarik menanamkan modal di daerah yang memiliki keuangan daerah yang solid, karena dianggap mampu menyediakan infrastruktur, fasilitas pendukung, dan iklim bisnis yang kondusif (Novitasari *et al.*, 2020). Selain itu, yang tinggi juga mencerminkan kapasitas ekonomi daerah yang berkembang, seperti aktivitas bisnis yang aktif, produktivitas yang tinggi, dan kontribusi sektor-sektor unggulan yang signifikan.

Dana Perimbangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah (Asari & Suardana, 2018). Dana Perimbangan memungkinkan daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas untuk membiayai kebutuhan dasar pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur (Andriana, 2020). Dana Perimbangan umumnya memberikan alokasi anggaran yang cukup besar dalam APBD, sehingga turut mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal (Haga, 2024). Namun, penggunaan Dana Perimbangan harus dikelola secara efektif dan terarah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Hubungan Belanja Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi Teori Pertumbuhan Ekonomi menjelaskan bahwa belanja pemerintah, khususnya belanja modal, merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.



Gambar 4. Kerangka Penelitian

- H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Belanja Pemerintah
- H2: Dana Perimbangan berpengaruh langsung terhadap Belanja Pemerintah
- H3: Belanja Pemerintah berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H4: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H5: Dana Perimbangan berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H6: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Pemerintah
- H7: Dana Perimbangan berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Pemerintah

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2017–2022. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, seperti laporan keuangan daerah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0 untuk menguji model penelitian yang diajukan.

Dalam WarpPLS 7.0, uji validitas dan reliabilitas bertujuan memastikan bahwa indikator secara akurat merepresentasikan konstruk. Validitas konvergen dinilai melalui *Average Variance Extracted* (AVE) dan *loading factor*, di mana nilai $AVE \geq 0.50$ dan $loading\ factor \geq 0.70$ menunjukkan indikator mampu menjelaskan sebagian besar varians konstruk (Feng *et al.*, 2018). Validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria *Fornell Larcker*, di mana akar kuadrat AVE harus lebih besar dari korelasi antar konstruk, serta *cross loadings* yang memastikan indikator lebih berkorelasi dengan konstraknya sendiri dibandingkan konstruk lain. Reliabilitas diukur melalui *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's Alpha*, dengan nilai ≥ 0.70 dianggap memadai (Abunima *et al.*, 2018). CR menunjukkan konsistensi indikator dalam merefleksikan konstruk, sementara *Cronbach's Alpha* menguji homogenitas indikator dalam satu konstruk, memberikan gambaran keandalan model secara keseluruhan. Persamaan regresi linear bergandanya sebagai berikut:

$$Y1 = \alpha1X1 + \alpha2X2 + \epsilon1$$

$$Y2 = \alpha1X1 + \alpha2X2 + \alpha4Y1 + \epsilon2$$

Dimana:

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Dana Perimbangan

Z : Belanja Pemerintah

Y2 : Pertumbuhan Ekonomi

ϵ : Error Term

β : *Path Coefficient*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. *Average Variance Extracted (AVE)*

PAD	(1.000)	0.604	0.729	0.530
DAPER	0.604	(0.754)	0.782	0.442
BELANJA	0.729	0.782	(0.799)	0.333
PEKONOMI	0.530	0.442	0.333	(1.000)

Tabel 1 menunjukkan matriks korelasi antar variabel laten, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi, yang disertai dengan akar dari nilai Average Variance Extracted (AVE) pada diagonal tabel. Nilai korelasi antara variabel PAD dan Dana Perimbangan adalah 0.604, sementara akar AVE untuk variabel PAD adalah (1.000) dan untuk variabel Dana Perimbangan adalah (0.754). Selanjutnya, nilai korelasi antara variabel Belanja Daerah dan PAD adalah 0.729, dengan akar AVE Belanja Daerah sebesar (0.799). Di sisi lain, nilai korelasi antara variabel Pertumbuhan Ekonomi dan PAD adalah 0.530, dengan akar AVE Pertumbuhan Ekonomi sebesar (1.000). Secara keseluruhan, nilai akar AVE untuk setiap variabel lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variabel lainnya, yang menunjukkan validitas diskriminan telah terpenuhi.

Tabel 2. *indicator loadings dan cross loadings*

	PAD	DAPER	BELANJA	PEKONOMI	Type (as defined)	SE	P value
PAD	(1.000)	0.000	0.000	0.000	<i>Reflective</i>	0.061	<0.001
DAU	0.336	(0.802)	0.646	-0.173	<i>Reflective</i>	0.063	<0.001
DBH SDA	0.515	(0.643)	-1.254	-0.492	<i>Reflective</i>	0.065	<0.001
DBH PAJAK	-0.746	(0.805)	0.359	0.566	<i>Reflective</i>	0.063	<0.001
B.OP	0.721	0.390	(0.799)	0.000	<i>Reflective</i>	0.063	<0.001
BM	-0.721	-0.390	(0.799)	0.000	<i>Reflective</i>	0.063	<0.001
PE	0.000	0.000	0.000	(1.000)	<i>Reflective</i>	0.061	<0.001

Tabel 2 menunjukkan hasil *indicator loadings* dan *cross-loadings* dari variabel laten Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi. Nilai *loadings* merepresentasikan kontribusi indikator terhadap variabel laten, sementara *cross-loadings* menunjukkan hubungan dengan variabel lain. Indikator X1 memiliki *loading* tertinggi pada Pendapatan Asli Daerah (1.000) tanpa hubungan dengan variabel lain. Indikator X2.1 dan X2.2 terutama berkaitan dengan Dana Perimbangan, dengan *loading* masing-masing sebesar (0.802) dan (0.643), sementara *cross-loadings* menunjukkan

hubungan kecil atau negatif dengan variabel lain. Indikator Z1.1 dan Z1.2 memiliki *loading* tinggi pada Belanja Daerah (0.799), sedangkan Pertumbuhan Ekonomi (variabel Y) memiliki *loading* (1.000). Semua indikator bersifat reflektif dengan nilai *Standard Error* berkisar 0.061–0.065 dan *p-value* <0.001, menunjukkan bahwa pengukuran stabil, signifikan, dan mendukung validitas diskriminan.

Tabel 3. *Latent variable coefficients*

	PAD	DAPER	BELANJA	PEKONOMI
R-squared			0.725	0.497
Adj. R-squared			0.722	0.489
Composite reliab.	1.000	0.797	0.780	1.000
Cronbach's alpha	1.000	0.616	0.435	1.000
Avg. var. extrac.	1.000	0.569	0.639	1.000

Tabel 3 menunjukkan koefisien variabel laten untuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi. Nilai R-squared tertinggi adalah 0.725 untuk Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai 0.497. Reliabilitas komposit dan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki reliabilitas sempurna (1.000), sementara Dana Perimbangan dan Belanja Daerah memiliki nilai yang cukup baik (masing-masing 0.797 dan 0.780 untuk reliabilitas komposit). Average Variance Extracted (AVE) juga menunjukkan validitas yang kuat untuk semua variabel, dengan nilai tertinggi pada Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (1.000). Nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 5 untuk semua variabel menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas, sehingga model ini memiliki reliabilitas, validitas, dan interpretabilitas yang baik.

Tabel 4. Uji Signifikansi Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Variabel		<i>Direct Effect</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
PAD	Belanja Daerah	0.406	<0.001	Signifikan
Dana Perimbangan	Belanja Daerah	0.530	<0.001	Signifikan
PAD	Pertumbuhan Ekonomi	0.541	<0.001	Signifikan
Dana Perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi	0.291	<0.001	Signifikan
Belanja Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	0.244	<0.001	Signifikan

Tabel 4 menunjukkan koefisien jalur (*path coefficients*) dan nilai *p-value* untuk hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi. Koefisien jalur tertinggi terlihat pada hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah (0.406) dan Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah (0.541), yang menunjukkan pengaruh signifikan. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (0.530), Dana Perimbangan (0.291), dan Belanja Daerah (0.244). Semua hubungan memiliki nilai *p-value* di bawah 0.001, yang menunjukkan bahwa hubungan-hubungan tersebut signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan kontribusi variabel-variabel dalam model secara signifikan terhadap variabel-variabel lainnya.

Tabel 5. Uji Signifikansi *Indirect Effect* dan *Total Effect*

Variabel		<i>Indirect Effect</i>	<i>Total Effect</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
PAD	Belanja Daerah		0.406	<0.001	Signifikan
Dana Perimbangan	Belanja Daerah		0.541	<0.001	Signifikan
PAD	Pertumbuhan Ekonomi		0.629	<0.001	Signifikan
Dana Perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi	0.099		<0.001	Signifikan
Dana Perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi		0.423	<0.001	Signifikan
Dana Perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi	0.132		<0.001	Signifikan
PAD	Belanja Daerah			<0.001	Signifikan
Belanja Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi		0.244	<0.001	Signifikan

Tabel 5 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara signifikan memengaruhi Belanja Daerah dengan total efek masing-masing sebesar 0.406 dan 0.541 ($p < 0.001$). Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan total efek sebesar 0.629 ($p < 0.001$). Dana

Perimbangan memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi secara langsung dengan total efek 0.423 dan melalui jalur tidak langsung sebesar 0.099 dan 0.132, keduanya signifikan ($p < 0.001$). Belanja Daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan total efek sebesar 0.244 ($p < 0.001$). Semua hubungan dalam model dinyatakan signifikan secara statistik, menunjukkan relevansi variabel dalam menjelaskan dinamika ekonomi dalam model.

5. PEMBAHASAN

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

PAD adalah indikator kunci yang menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonominya, seperti pajak dan retribusi. Ketika suatu daerah mampu meningkatkan PAD-nya, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk membiayai berbagai program dan pelayanan masyarakat (Haga, 2024). Dengan PAD yang tinggi, daerah dapat lebih leluasa dalam menentukan prioritas belanja, sehingga dapat mengalokasikan dana untuk proyek-proyek penting yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana Perimbangan merupakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang dirancang untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Dana ini sangat berharga bagi daerah yang tergantung pada dukungan dari pusat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik. Dengan Dana Perimbangan, pemerintah daerah yang sebelumnya mungkin mengalami kesulitan dalam anggaran dapat melanjutkan program-program penting, seperti pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

c. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja daerah yang dialokasikan dengan baik, terutama untuk investasi dalam infrastruktur, dapat memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah daerah berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, ini meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang pada akhirnya membuka peluang bagi usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Belanja yang meningkat pada sektor-sektor ini akan mendorong aktivitas ekonomi, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah.

d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ketika suatu daerah memiliki PAD yang lebih tinggi, ini biasanya mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih baik dan lebih stabil. Daerah yang mampu mengelola potensi ekonomi mereka dengan baik cenderung lebih mampu menarik perhatian investor. Ketika investor datang, mereka berinvestasi dalam bisnis dan proyek-proyek baru yang meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

e. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Perimbangan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber pendanaan. Dengan alokasi yang bijaksana, dana ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan program-program sosial yang penting. Ketika Dana Perimbangan dikelola dengan baik, ia dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan .

f. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar. Ketika pendapatan daerah meningkat, pemerintah dapat menginvestasikan lebih banyak dalam belanja publik yang produktif. Ini berarti lebih banyak investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik yang membuat daerah lebih menarik bagi investor dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan .

g. Pengaruh Dana Perimbangan melalui Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Perimbangan memberikan peluang bagi daerah yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Ketika dana ini digunakan untuk meningkatkan belanja publik, terutama dalam proyek-proyek strategis, daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur, yang dapat langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan pengelolaan jumlah dana yang tepat, daerah dapat memperbaiki kondisi ekonominya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat .

6. KESIMPULAN

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah sangat saling terkait dan krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD yang tinggi memungkinkan daerah untuk memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik, sehingga dapat

mengalokasikan belanja untuk proyek-proyek penting. Sementara itu, Dana Perimbangan berfungsi sebagai sumber dukungan finansial bagi daerah yang kurang mampu, membantu memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik dan infrastruktur. Kombinasi dari belanja yang efektif dan pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2020). Pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Ardianti, P. A. R., & Suartana, I. W. (2020). Kompetensi sumber daya manusia dan implementasi sistem keuangan desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2839. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p10>
- Arif, U., Javid, M., & Khan, F. N. (2020). Productivity impacts of infrastructure development in Asia. *Economic Systems*, 45(1), 100851. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100851>
- Asari, N. M. A., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada belanja daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 877. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p03>
- Astuti, S. Y., Basyah, M. A., & Niswah, F. M. (2021). The effect of PAD, DAU, and DAK on poverty rates in Java. *International Journal of Science Technology & Management*, 2(5), 1668. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i5.321>
- Ghani, N. A. R. N. A. (2017). Beneficial ownership in sukuk ijarah: A Shari'ah appraisal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 2. <https://doi.org/10.1108/imefm-02-2017-0026>
- Haga, R. (2024). The influence of local own source revenue, fiscal balance transfer, and regional budget expenditure on sustainable development goals (SDGs) social aspects in Palangka Raya City. *JEMBA Jurnal Ekonomi Pembangunan Manajemen dan Bisnis Akuntansi*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.52300/jemba.v4i1.14337>
- Kesa, D. D. (2021). Improving the potential of Laku Pandai (branchless banking) to develop sustainable financial inclusion. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1), 012088. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012088>
- Kusharsanto, Z. S., Maninggar, N., Suhandoyo, S., Maulidya, D., & Muzaki, A. R. (2021). How infrastructure contributes to fostering regional innovation system: The case of Pelalawan Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 778(1), 012001. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/778/1/012001>

- Lestari, E. K., Wibisono, S., & Sa'bandianto, D. (2022). Pengaruh besaran perekonomian, tingkat upah, dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014–2018. *Jurnal Ekuilibrium*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.19184/jek.v6i1.24933>
- Najmuddin, Z. (2020). The impact of government expenditure on Banten economic growth in 2010–2017. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(1), 54. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i1.104>
- Noviriani, E., Mukaromah, L., Zurmansyah, E., & Munandar. (2023). Studi literatur industrialisasi dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1). <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.587>
- Novitasari, F., Drestalita, N. C., & Maryati, S. (2020). The impacts of infrastructure development on economic growth (Case study: DKI Jakarta, Banten Province, and West Java Province). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 592(1), 012017. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/592/1/012017>
- Pangestu, P. P., Saleh, M., & Priyagus, P. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Kalimantan Timur. *Edunomics Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.37304/ej.v4i1.7944>
- Rhamedia, H. (2022). Pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat ditinjau dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja daerah sebagai pemediasi. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 7(3), 1. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i3.170>
- Sari, D. M. M. Y., & Wirama, D. G. (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK pada alokasi belanja modal dengan pendapatan per kapita sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2065. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p16>
- Savira, F., Wahyunadi, & Fatimah, S. (2022). Pengaruh PAD, belanja modal, dan TPAK terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten/Kota Provinsi NTB tahun 2015–2020. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v1i1.132>
- Sumangkut, E. Y., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan belanja daerah di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(2). <https://doi.org/10.35794/jpek.d.12792.18.2.2016>
- Suswanta, S., & Rachmandani, R. E. (2021). Pembuatan website Kampung Ikan Hias Kadisoro menuju desa agroeduwisata. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.18196/ppm.33.333>